



Paradigma Administrasi Publik Kontemporer: Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Dari Government Menuju Governance

Aufial Hidayat¹⁾, Afriva Khaidir²⁾, M. Facri Adnan³⁾

Universitas Negeri Padang, Indonesia

aufialhidayat959@gmail.com¹⁾

af.khaidir@fis.unp.ac.id²⁾

fachriadnan@fis.unp.ac.id³⁾

Abstrak

Transformasi administrasi publik dari paradigma *government* menuju *governance* menjadi salah satu ciri utama perkembangan tata kelola pemerintahan modern. Dalam paradigma *governance*, pemerintah tidak lagi berperan sebagai aktor tunggal, tetapi bekerja sama dengan masyarakat, sektor swasta, dan berbagai pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi paradigma administrasi publik kontemporer pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam perspektif transformasi dari *government* menuju *governance*. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) melalui analisis dokumen resmi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024–2025, publikasi Badan Pusat Statistik, laporan kinerja pemerintah daerah, regulasi, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan. Analisis difokuskan pada penerapan prinsip-prinsip *governance*, yaitu partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas pelayanan publik, kolaborasi, dan digitalisasi pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah menerapkan berbagai prinsip *governance* melalui penguatan pemerintahan nagari, pelaksanaan Musrenbang, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan keterbukaan informasi publik, serta kerja sama dengan berbagai pihak dalam pembangunan daerah. Namun, masih terdapat beberapa tantangan, seperti keterbatasan kapasitas aparatur, kesenjangan akses teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat yang belum optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi dari *government* menuju *governance* di Kabupaten Pasaman Barat telah menunjukkan perkembangan yang positif berdasarkan dokumen kinerja dan data resmi terbaru tahun 2024–2025, meskipun masih diperlukan penguatan kelembagaan, inovasi pelayanan publik, dan kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Administrasi Publik, Governance, Government, Pemerintah Daerah, Pasaman Barat

Abstract

The transformation of public administration from a *government* paradigm to *governance* has become one of the main characteristics of the development of modern governance. In the *governance* paradigm, the government no longer acts as a sole actor, but collaborates with the community, the private sector, and various stakeholders in governance and development. This study aims to analyze the implementation of the contemporary public administration paradigm in the West Pasaman Regency Government from the perspective of the transformation from *government* to *governance*. The study uses a qualitative approach with a library research method through analysis of official documents of the West Pasaman Regency Government for 2024–2025, publications from the Central Statistics Agency (BPS), regional government performance reports, regulations, and various relevant scientific literature. The analysis focuses on the application of governance principles, namely participation, transparency, accountability, effectiveness of



public services, collaboration, and digitalization of government. The results of the study indicate that the West Pasaman Regency Government has implemented various governance principles through strengthening village government, implementing Musrenbang (Development Planning Forum), implementing an Electronic-Based Government System (SPBE), increasing public information disclosure, and collaborating with various parties in regional development. However, several challenges remain, such as limited apparatus capacity, gaps in access to information technology, and suboptimal public participation. This study concludes that the transformation from government to governance in West Pasaman Regency has shown positive developments based on the latest performance documents and official data for 2024–2025, although institutional strengthening, public service innovation, and cross-sector collaboration are still needed to realize more effective, participatory, and sustainable governance..

Keywords: Public Administration, Governance, Government, Local Government, Pasaman Barat.

PENDAHULUAN

Perkembangan administrasi publik pada abad ke-21 menunjukkan adanya perubahan paradigma yang signifikan dari model pemerintahan tradisional (*government*) menuju tata kelola pemerintahan modern (*governance*). Perubahan ini terjadi sebagai respons terhadap meningkatnya kompleksitas permasalahan publik yang tidak lagi dapat diselesaikan secara efektif melalui pendekatan birokrasi yang hierarkis dan terpusat. Dalam paradigma *government*, pemerintah berperan sebagai aktor utama yang memiliki kewenangan dominan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Sebaliknya, paradigma *governance* menekankan pentingnya keterlibatan berbagai aktor, termasuk masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi, dan organisasi non-pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan (Osborne, 2021).

Pergeseran paradigma tersebut merupakan bagian dari perkembangan administrasi publik kontemporer yang dipengaruhi oleh globalisasi, perkembangan teknologi informasi, tuntutan demokratisasi, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak publik. Menurut Ansell dan Torfing (2021), konsep *governance* tidak hanya berorientasi pada efektivitas birokrasi, tetapi juga pada penciptaan nilai publik (*public value*) melalui kolaborasi antaraktor yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks ini, pemerintah tidak lagi diposisikan sebagai satu-satunya penyedia layanan publik, melainkan sebagai fasilitator yang mampu mengelola jejaring kerja sama untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Di Indonesia, implementasi paradigma *governance* semakin menguat sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan daerah masing-masing. Desentralisasi tidak hanya bertujuan meningkatkan efektivitas pelayanan publik, tetapi juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah (Kementerian Dalam Negeri, 2023).

Dalam perspektif administrasi publik kontemporer, keberhasilan pemerintah daerah tidak lagi hanya diukur berdasarkan kemampuan menjalankan fungsi administratif, tetapi juga dari kapasitasnya dalam membangun tata kelola yang transparan, akuntabel, partisipatif, responsif, dan kolaboratif. Oleh karena itu, konsep *good governance* menjadi landasan penting dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi *governance* pada pemerintahan lokal di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam aspek partisipasi, kolaborasi, dan kapasitas kelembagaan. Rifai, Hattab, dan Astuti (2025) menunjukkan bahwa keberhasilan *collaborative governance* dalam pembangunan pedesaan sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi, keterlibatan masyarakat, dan kemampuan para aktor dalam mencapai konsensus. Sementara itu, Lukitasari, Nurdin, dan Indrayani (2025) menemukan bahwa keberhasilan implementasi SPBE sangat ditentukan oleh kesiapan infrastruktur teknologi, kompetensi sumber daya manusia, dan literasi digital masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi menuju *governance* tidak hanya membutuhkan dukungan regulasi, tetapi juga kesiapan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat di tingkat lokal.

Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 sebagai hasil pemekaran Kabupaten Pasaman. Sebagai daerah yang relatif muda, Pasaman Barat menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan daerah lain dalam membangun kapasitas pemerintahan, memperkuat kelembagaan, dan mengelola pembangunan yang tersebar di wilayah yang luas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat (2025), daerah ini memiliki luas wilayah 3.864,02 km² yang terbagi ke dalam 11 kecamatan dan 90 nagari dengan jumlah penduduk mencapai 454.053 jiwa pada tahun 2024. Struktur pemerintahan yang mencakup banyak nagari tersebut menjadikan Pasaman Barat memiliki karakteristik tata kelola yang unik karena proses pembangunan tidak hanya melibatkan pemerintah daerah, tetapi juga pemerintahan nagari sebagai institusi lokal yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat.

Keunikan lain yang menjadikan Pasaman Barat menarik untuk dikaji adalah dominasi sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, sebagai penggerak utama perekonomian daerah. Ketergantungan terhadap sektor sawit menciptakan dinamika pembangunan yang melibatkan berbagai aktor, seperti pemerintah daerah, perusahaan perkebunan, koperasi, kelompok tani, dan masyarakat lokal. Kompleksitas hubungan antaraktor tersebut menuntut pola penyelenggaraan pemerintahan yang tidak lagi bertumpu pada pendekatan birokrasi tradisional (*government*), tetapi membutuhkan tata kelola kolaboratif (*governance*) yang mampu mengakomodasi berbagai kepentingan secara seimbang. Dalam konteks ini, Pasaman Barat menjadi contoh yang relevan untuk mengkaji bagaimana transformasi administrasi publik berlangsung pada daerah pemekaran yang memiliki karakter ekonomi berbasis sumber daya alam dan struktur pemerintahan nagari yang kuat.

Secara normatif, berbagai regulasi nasional telah mendorong penerapan prinsip-prinsip *good governance* melalui desentralisasi, reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Namun demikian, implementasi prinsip-prinsip tersebut di tingkat daerah tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Terdapat kesenjangan antara konsep *governance* yang menekankan partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi dengan realitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang masih menghadapi berbagai keterbatasan struktural dan kelembagaan.

Kondisi tersebut juga terlihat di Kabupaten Pasaman Barat. Di satu sisi, pemerintah daerah telah mengembangkan berbagai inovasi tata kelola melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan keterbukaan informasi publik, penguatan kelembagaan nagari, dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai mekanisme partisipatif. Namun di sisi lain, masih terdapat berbagai hambatan yang berpotensi mengurangi efektivitas implementasi *governance*, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur, kesenjangan infrastruktur dan akses teknologi informasi antarwilayah, rendahnya literasi digital masyarakat, serta belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan dan pengawasan kebijakan publik. Kondisi geografis yang luas serta keberagaman karakteristik sosial-ekonomi masyarakat di 90 nagari juga menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan kolaboratif.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang penting untuk dikaji, yaitu bagaimana prinsip-prinsip *governance* yang secara normatif telah menjadi arah reformasi administrasi publik dapat diimplementasikan dalam konteks daerah pemekaran dengan karakteristik pemerintahan nagari yang kuat dan struktur ekonomi yang didominasi sektor perkebunan sawit. Sebagian besar kajian *governance* di Indonesia masih berfokus pada aspek konseptual atau pada daerah perkotaan, sementara kajian yang secara spesifik menganalisis transformasi paradigma administrasi publik dari *government* menuju *governance* dalam konteks Kabupaten Pasaman Barat masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami sejauh mana transformasi tersebut telah berlangsung, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya, serta implikasinya terhadap penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis kebijakan, tata kelola pemerintahan, dan implementasi paradigma administrasi publik melalui berbagai dokumen dan data sekunder yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, seleksi, dan pengkajian dokumen resmi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pasaman Barat.

Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber sekunder, meliputi dokumen perencanaan dan kinerja Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat periode 2024–2025, seperti Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), laporan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dokumen reformasi birokrasi, laporan keterbukaan informasi publik, serta dokumen Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Selain itu, penelitian juga menggunakan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024–2025, regulasi nasional dan daerah yang terkait dengan tata kelola pemerintahan, serta artikel jurnal ilmiah dan buku yang relevan dengan konsep *governance*, *New Public Governance*, *Collaborative Governance*, dan *Digital Governance*.

Pemilihan dokumen dilakukan berdasarkan tiga kriteria, yaitu relevansi terhadap tema transformasi administrasi publik, aktualitas data (terutama dokumen periode 2024–2025), dan kredibilitas sumber. Dokumen yang telah terkumpul kemudian direduksi melalui proses seleksi untuk mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan prinsip-prinsip *governance*, yaitu partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, kolaborasi, dan digitalisasi pemerintahan.

Analisis data dilakukan menggunakan metode *content analysis* (analisis isi) yang dipadukan dengan analisis tematik (*thematic analysis*). Pada tahap pertama, peneliti mengidentifikasi dan mengelompokkan isi dokumen berdasarkan tema-tema yang sesuai dengan kerangka teori penelitian. Pada tahap kedua, data dikategorikan ke dalam indikator-indikator yang merepresentasikan implementasi *governance*, seperti mekanisme partisipasi masyarakat, transparansi informasi publik, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, kolaborasi antaraktor pembangunan, serta penerapan SPBE dan inovasi pelayanan digital. Tahap selanjutnya adalah interpretasi data untuk menemukan pola, kecenderungan, serta kesesuaian antara konsep teoritis *governance* dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pasaman Barat. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-kualitatif untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai transformasi paradigma administrasi publik dari *government* menuju *governance* pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Paradigma Government menuju Governance

Paradigma *governance* mengubah posisi pemerintah dari aktor dominan menjadi fasilitator yang membangun jejaring kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Dalam konteks Kabupaten Pasaman Barat, transformasi tersebut terlihat melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Salah satu instrumen utama yang digunakan adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat nagari, kecamatan, hingga kabupaten. Melalui mekanisme ini, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan yang kemudian diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah.

Transformasi menuju *governance* menjadi semakin penting mengingat karakteristik Kabupaten Pasaman Barat yang memiliki luas wilayah 3.864,02 km² dengan 11 kecamatan dan 90 nagari. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat (2025), jumlah penduduk mencapai 454.053 jiwa pada tahun 2024. Luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar menyebabkan pemerintah daerah tidak dapat lagi mengandalkan pendekatan birokrasi tradisional yang bersifat sentralistik, tetapi memerlukan keterlibatan aktif masyarakat dan berbagai aktor pembangunan lainnya.

Pola pembangunan yang sebelumnya bersifat *top-down* mulai bergeser menuju pendekatan partisipatif yang memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi ini menunjukkan adanya implementasi prinsip governance yang menempatkan masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan daerah.

Penguatan Pemerintahan Nagari

Sistem pemerintahan nagari merupakan karakteristik khas Sumatera Barat yang memiliki nilai strategis dalam penerapan governance. Di Kabupaten Pasaman Barat terdapat 90 nagari yang tersebar pada 11 kecamatan. Keberadaan nagari menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan pemerintahan yang partisipatif karena nagari berfungsi sebagai institusi yang paling dekat dengan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat terus memperkuat kapasitas pemerintahan nagari melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola keuangan nagari, serta pemberdayaan masyarakat. Penguatan kapasitas tersebut penting mengingat nagari memiliki peran sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal.

Selain itu, berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan melalui dana desa dan dana nagari telah memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan, nagari menjadi salah satu instrumen utama dalam mewujudkan prinsip governance di tingkat lokal.

Digitalisasi Pelayanan Publik

Transformasi digital menjadi bagian penting dari administrasi publik kontemporer. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah mengembangkan berbagai layanan berbasis elektronik melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Digitalisasi pelayanan publik dilakukan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, mempercepat proses pelayanan, mengurangi biaya administrasi, dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemerintah.

Beberapa aplikasi dan sistem yang digunakan antara lain SRIKANDI untuk tata naskah dinas elektronik, SP4N-LAPOR! sebagai sarana pengaduan masyarakat, SICANTIK Cloud untuk pelayanan perizinan, SIASN untuk manajemen aparatur sipil negara, SIPD untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah, JDIH sebagai pusat dokumentasi dan informasi hukum daerah, LPSE untuk pengadaan barang dan jasa secara elektronik, e-Kinerja untuk pengukuran kinerja aparatur pemerintah daerah, serta Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) yang dimanfaatkan dalam upaya pendampingan calon pengantin dan percepatan pencegahan stunting. Implementasi berbagai aplikasi tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam mengembangkan ekosistem pemerintahan digital yang terintegrasi serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor.

Pemanfaatan aplikasi Elsimil menjadi contoh bagaimana digitalisasi tidak hanya digunakan untuk meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan, tetapi juga untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, BKKBN, tenaga kesehatan, kader pendamping keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian, transformasi digital yang dilakukan tidak hanya mencerminkan penerapan prinsip Digital Governance, tetapi juga mendukung penciptaan public value sebagaimana ditekankan dalam paradigma New Public Governance.

Pentingnya digitalisasi semakin terlihat seiring meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan pelayanan publik. Dengan jumlah penduduk lebih dari 454 ribu jiwa, pemerintah daerah dituntut menyediakan pelayanan yang cepat dan mudah diakses oleh masyarakat. Berbagai aplikasi layanan administrasi, sistem informasi pemerintahan daerah, serta pemanfaatan website resmi pemerintah menjadi bagian dari transformasi digital yang sedang berlangsung.

Selain meningkatkan efisiensi pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi juga mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan melalui penyediaan informasi publik yang lebih mudah diakses masyarakat. Digitalisasi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan

Governance menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berupaya meningkatkan keterbukaan informasi publik melalui publikasi program pembangunan, laporan kinerja, laporan keuangan daerah, serta informasi pelayanan publik melalui media digital dan website resmi pemerintah daerah.

Peningkatan transparansi menjadi penting karena Kabupaten Pasaman Barat masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan, termasuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data BPS Kabupaten Pasaman Barat (2025), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pasaman Barat mencapai sekitar 74,27 pada tahun 2024. Meskipun mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, angka tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih perlu memperkuat kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat.

Keterbukaan informasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah. Dengan demikian, transparansi tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, tetapi juga memperkuat akuntabilitas birokrasi dalam penggunaan sumber daya publik.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Lukitasari et al. (2025) yang menjelaskan bahwa implementasi SPBE mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur digital dan kompetensi aparatur pemerintah. Oleh karena itu, pengembangan SPBE di Kabupaten Pasaman Barat tidak hanya memerlukan penyediaan aplikasi digital, tetapi juga penguatan kapasitas aparatur dan pemerataan akses teknologi informasi hingga ke tingkat nagari.

Collaborative Governance dalam Pembangunan Daerah

Pendekatan *collaborative governance* menjadi semakin penting dalam menghadapi kompleksitas persoalan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tidak dapat bekerja sendiri dalam menyelesaikan berbagai persoalan publik sehingga diperlukan kolaborasi dengan sektor swasta, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal.

Kolaborasi tersebut terlihat dalam berbagai program pembangunan seperti pemberdayaan UMKM, pengembangan sektor pertanian dan perkebunan, pengelolaan lingkungan hidup, peningkatan kualitas pendidikan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah sehingga memerlukan kerja sama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Melalui pendekatan kolaboratif, pemerintah dapat memanfaatkan sumber daya, pengetahuan, dan kapasitas yang dimiliki berbagai pemangku kepentingan untuk menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Hasil penelitian ini juga memperkuat temuan Rifai et al. (2025) yang menunjukkan bahwa *collaborative governance* menjadi efektif apabila seluruh pemangku kepentingan terlibat dalam proses identifikasi masalah, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program secara bersama-sama. Dalam konteks Pasaman Barat, keberadaan 90 nagari memberikan ruang yang besar bagi pengembangan kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah nagari, masyarakat, sektor swasta perkebunan, dan lembaga pendidikan untuk mendukung pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Arfita, Valentina, dan

Putera (2024) yang menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan nagari di Sumatera Barat sangat dipengaruhi oleh kualitas kolaborasi antara pemerintah nagari, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Tantangan Implementasi Governance

Meskipun telah menunjukkan berbagai kemajuan, implementasi *governance* di Kabupaten Pasaman Barat masih menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, kapasitas aparatur pemerintah dalam mengelola inovasi pelayanan publik dan transformasi digital belum merata. Kondisi ini terlihat dari masih perlunya pelaksanaan berbagai kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi penggunaan aplikasi SPBE bagi aparatur daerah. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya memerlukan infrastruktur teknologi, tetapi juga peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang berkelanjutan. (Pasaman Barat)

Kedua, luas wilayah Kabupaten Pasaman Barat yang mencakup 11 kecamatan dan 90 nagari menyebabkan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan akses internet belum merata. Akibatnya, manfaat digitalisasi pelayanan publik belum dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh masyarakat, terutama di wilayah yang relatif jauh dari pusat pemerintahan. Kondisi ini menjadi tantangan dalam mewujudkan prinsip inklusivitas yang menjadi bagian penting dari paradigma *governance*.

Ketiga, partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik masih menghadapi kendala substantif. Meskipun forum Musrenbang telah tersedia sebagai wadah partisipasi formal, keterlibatan masyarakat sering kali masih berfokus pada penyampaian usulan program dan belum sepenuhnya berkembang menjadi proses kolaboratif dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, maupun evaluasi kebijakan. Padahal, menurut perspektif *New Public Governance* (Osborne, 2021), penciptaan *public value* menuntut keterlibatan aktif masyarakat sebagai mitra pemerintah, bukan hanya sebagai penerima manfaat pembangunan.

Keempat, kolaborasi lintas sektor yang menjadi inti *Collaborative Governance* masih memerlukan penguatan. Dominasi sektor perkebunan kelapa sawit dalam perekonomian daerah menuntut adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, pemerintah nagari, perusahaan perkebunan, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil. Namun, perbedaan kepentingan antaraktor, keterbatasan kapasitas koordinasi, dan belum optimalnya mekanisme kolaborasi sering kali menjadi hambatan dalam mewujudkan tata kelola yang benar-benar partisipatif.

Tantangan tersebut sejalan dengan berbagai studi administrasi publik di Indonesia yang menunjukkan bahwa transformasi digital dan tata kelola kolaboratif sering kali terkendala oleh keterbatasan kapasitas aparatur, ketimpangan infrastruktur, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Lukitasari et al. (2025) menegaskan bahwa kesenjangan infrastruktur dan kompetensi sumber daya manusia merupakan faktor utama yang menghambat optimalisasi SPBE di daerah. Sementara itu, Rifai et al. (2025) menunjukkan bahwa lemahnya komunikasi dan koordinasi antaraktor dapat mengurangi efektivitas proses kolaborasi dalam pembangunan lokal. Dengan demikian, tantangan implementasi *governance* di Kabupaten Pasaman Barat tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menyangkut penguatan kapasitas kelembagaan dan pembangunan jejaring kolaborasi yang berkelanjutan.

Selain itu, keterbatasan fiskal daerah dan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang cukup besar berpotensi memengaruhi keberlanjutan berbagai program inovasi pemerintahan dan digitalisasi layanan publik. Dalam perspektif *New Public Governance*, keberhasilan transformasi menuju *governance* tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi atau teknologi, tetapi juga oleh komitmen politik, kapasitas kelembagaan, ketersediaan sumber daya, dan kemampuan pemerintah membangun jejaring kolaborasi yang efektif dengan berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, transformasi dari *government* menuju *governance* di Kabupaten Pasaman Barat perlu dipahami sebagai proses jangka panjang yang memerlukan penguatan kapasitas aparatur, peningkatan kualitas kolaborasi, serta dukungan kebijakan dan anggaran yang berkelanjutan.



SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah mengalami transformasi administrasi publik dari paradigma *government* menuju *governance* yang ditandai oleh meningkatnya partisipasi masyarakat melalui Musrenbang, penguatan peran 90 nagari sebagai institusi pemerintahan lokal, pengembangan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan berbagai layanan digital publik. Transformasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak lagi berperan sebagai aktor tunggal, tetapi semakin berfungsi sebagai fasilitator yang mendorong keterlibatan masyarakat dan jejaring kerja sama dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Meskipun demikian, implementasi *governance* di Kabupaten Pasaman Barat masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait kapasitas aparatur, kesenjangan akses teknologi informasi antarwilayah, kualitas partisipasi masyarakat yang belum optimal, serta belum kuatnya kolaborasi lintas sektor. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan *governance* tidak hanya bergantung pada regulasi dan digitalisasi, tetapi juga pada kapasitas kelembagaan, ketersediaan sumber daya, dan kemampuan membangun kemitraan yang berkelanjutan.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat relevansi perspektif *New Public Governance*, *Collaborative Governance*, dan *Digital Governance* dalam konteks pemerintahan lokal berbasis nagari. Temuan penelitian menunjukkan bahwa nagari tidak hanya berfungsi sebagai unit administratif, tetapi juga sebagai arena kolaborasi yang memungkinkan terciptanya *public value* melalui interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, karakteristik pemerintahan nagari menjadi faktor penting yang memperkaya pemahaman tentang implementasi *governance* pada daerah pemekaran dan wilayah yang memiliki institusi lokal berbasis adat.

Keterbatasan Penelitian dan Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan studi kepustakaan yang bertumpu pada analisis dokumen sekunder, sehingga belum dapat menggambarkan secara mendalam pengalaman dan perspektif para aktor yang terlibat dalam praktik *governance* di Kabupaten Pasaman Barat. Selain itu, penelitian ini berfokus pada dokumen dan data periode 2024–2025 sehingga belum mampu menangkap dinamika implementasi *governance* dalam rentang waktu yang lebih panjang.

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan studi lapangan melalui wawancara, observasi, atau metode campuran (*mixed methods*) untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik *governance* di tingkat nagari. Kajian komparatif antara Kabupaten Pasaman Barat dan daerah pemekaran lainnya juga penting dilakukan untuk memperluas pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan transformasi dari *government* menuju *governance* di tingkat pemerintahan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., Sørensen, E., & Torfing, J. (2023). The democratic quality of co-creation: A theoretical exploration. *International Review of Administrative Sciences*, 89(2), 343–360.
- Ansell, C., & Torfing, J. (2021). *Public Governance as Co-Creation: A Strategy for Revitalizing the Public Sector and Rejuvenating Democracy*. Cambridge University Press.
- Arfita, S., Valentina, T. R., & Putera, R. E. (2024). Collaborative governance in nagari development in West Sumatra. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 9(2), 125–139.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat. (2025). *Kabupaten Pasaman Barat dalam angka 2025*. BPS Kabupaten Pasaman Barat.



- Haug, N., Dan, S., & Mergel, I. (2023). Digitally induced change in the public sector: A systematic review and research agenda. *Public Management Review*, 26(10), 1963–1987.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2023). *Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2023*. Kemendagri.
- Lukitasari, W. N., Nurdin, I., & Indrayani, E. (2025). Transformasi digital pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE): Strategi efektif menghadapi politik dinasti pada Pilkada di OKU Timur. *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(3), 996–1008.
- Osborne, S. P. (2021). *Public service logic: Creating value for public service users, citizens and society through public service delivery*. Routledge.
- Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. (2025). *Profil Kabupaten Pasaman Barat tahun 2025*. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
- Rifai, A., Hattab, S., & Astuti, A. S. (2025). Collaborative governance dalam pembangunan sistem pengairan pedesaan di Desa Bakti Agung Kecamatan Poso Pesisir Utara. *Journal of Publicness Studies*, 2(1), 1–10.